

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi berbagai masalah perekonomian. Masalah-masalah tersebut menghambat kelangsungan hidup bidang ekonomi, sehingga mengganggu jalannya pembangunan. Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam GBHN adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila. Untuk menciptakan hal tersebut diperlukan dana yang besar.

Sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Di tengah-tengah perdebatan tentang penolakan terhadap ketergantungan pada hutang luar negeri maka sumber domestik menjadi isu yang menarik. Salah satu alternatif penggalan dana adalah penerimaan domestik bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembelian dalam negeri dapat berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, penerimaan pajak, dan investasi swasta. Tabungan masyarakat yang termobilisasi melalui perbankan dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai investasi oleh pihak swasta.

UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, menyebutkan bahwa perbankan sebagai prasarana institusional mempunyai peran dan posisi strategis. Pembangunan fungsi perbankan berhubungan dengan mekanisme pembayaran antara agen-agen ekonomi sebagai akibat kelebihan aliran dana yang kemudian

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Jadi perbankan mempunyai fungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pemberi informasi dan pengetahuan, pemberi jaminan, serta pencipta dan pemberi likuiditas.

Satu dasawarsa terakhir sektor moneter Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya sejak dicanangkan era deregulasi 1 Juni 1983 dan ditunjang oleh Pakto 1988 serta peraturan lain yang sejalan dengan itu. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya bank-bank dan lembaga keuangan, serta perubahan struktur aktiva dan pasiva. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis produk dan jasa perbankan yang memungkinkan lahirnya berbagai “uang” sebagai media pertukaran dan penyimpan kekayaan. Tentu saja hal tersebut menuntut peninjauan konsep dan definisi uang agar dapat merangkum fenomena yang ada. Hal ini karena konsep atau definisi uang mempunyai pengaruh yang besar terhadap teori dan kebijakan moneter (Insukindro, 1994).

Kemunculan bank dan kantor cabang baru dengan beragam produk dan jasa yang diminta atau ditawarkan kepada masyarakat menunjukkan peningkatan moneterisasi masyarakat. Dengan banyak munculnya bank dan kantor bank baru akan memudahkan masyarakat melakukan penyimpanan dana di bank. Hal ini karena jarak dan akses informasi produk yang ditawarkan oleh bank semakin mudah diperoleh.

Masyarakat merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan ekonomi. Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dengan keikutsertaan menghimpun dana melalui tabungan. Jumlah penduduk yang besar menjadi aset sekaligus beban dalam pembangunan. Jumlah penduduk dapat dijadikan sebagai aset bila meningkatkan kualitas produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat (Wirosarjono, 1998).

Pada sisi mikro bank melaksanakan usaha dengan tujuan memperoleh laba. Untuk mencapai hal tersebut bank melakukan berbagai strategi seperti bunga yang tinggi/menarik, promosi/periklanan, jaringan kantor cabang yang luas, penggunaan teknologi mutakhir misalnya ATM, bonus hadiah, fasilitas lain misalnya pembayaran rekening telepon dan listrik, dan jasa khusus misal rencana pembayaran gaji.

Sebagai salah satu pelaku dalam pembangunan, masyarakat memiliki sifat yang heterogen. Berbagai faktor relatif sangat mempengaruhi tingkat dan peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat yang berpendapatan tinggi memiliki peluang lebih besar dalam menabung daripada masyarakat yang berpendapatan rendah.

Setiap pelaku bisnis seperti pengusaha, manajer, dan individu dalam menjalankan bisnis tidak lepas dari berbagai alternatif keputusan investasi dan pembiayaan. Secara teoritis, keputusan investasi dan pembiayaan sangat tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku.

Tingkat bunga merupakan harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan yang besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman dari berbagai pelaku ekonomi pasar. Dengan tingkat bunga yang diharapkan yang tinggi harapan masyarakat akan lebih banyak lagi menyimpan dana lebih banyak, karena semakin banyak dana yang tersimpan di bank mereka akan mendapatkan keuntungan atau bunga yang lebih besar. Tingkat bunga secara simultan berpengaruh terhadap pengumpulan dana. Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat tergantung ada pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Sebagian simpanan berbentuk tabungan yang biasanya berasal dari simpanan masyarakat. Sebagian simpanan berupa tabungan pada umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Peringkat bank berdasarkan aset di DI Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Peringkat Bank Berdasarkan Aset
di Daerah Istimewa Yogyakarta
(dalam Milyaran Rupiah)

No	Nama Bank	Total Asset				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	PT. Bank Mandiri	281.311	264.838	252.669	293.205	241.462
2	PT. Bank Negara Indo. Tbk	135.739	148.988	126.059	132.797	159.828
3	PT. Bank Central Asia Tbk	95.367	102.218	116.943	131.890	136.303
4	PT. Bank Rakyat Indonesia	70.926	81.774	104.126	99.216	107.018
5	PT. Bank Danamon Indo. Tbk	60.357	52.540	47.431	52.752	58.371
6	PT. Bank Internasional Tbk	36.844	33.431	36.175	34.600	35.787
7	Citibank N. A	24.462	25.879	29.259	29.082	31.700
8	PT. Bank Tabungan Negara	24.378	26.593	27.373	26.866	30.824
9	PT. Lippo Bank Tbk	22.148	24.032	24.653	26.418	27.826
10	PT. Bank Niaga Tbk	18.69	22.997	24.466	23.746	26.760
	Total	770.141	783.290	789.154	850.570	845.879

Sumber : Data Perbankan Indonesia, BI 2003 – 2004.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa bank pemerintah lebih memiliki aset besar daripada bank swasta. Bank Mandiri yang merupakan gabungan dari bank pemerintah dari tahun 2000 – 2004 memiliki aset terbesar dalam pengoperasian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui laju kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses ketika terjadinya kenaikan PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka ada sebagian dana pendapatan masyarakat tersebut disimpan dalam bentuk tabungan di bank.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di muka maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah kantor cabang mempengaruhi jumlah tabungan pada bank umum pemerintah dan bank swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah suku bunga mempengaruhi jumlah tabungan pada bank umum pemerintah dan bank swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah produk domestik regional bruto (PDRB) mempengaruhi jumlah tabungan pada bank umum pemerintah dan bank swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kantor cabang terhadap jumlah tabungan pada bank umum pemerintah dan bank swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap jumlah tabungan pada bank umum pemerintah dan bank swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap jumlah tabungan pada bank umum pemerintah dan bank swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan teori dan penerapan serta pengembangan ilmu yang telah dipelajari.
2. Sebagai gambaran untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hubungan perbankan di DIY.